

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh adalah menjadi masalah global seluruh dunia dimana Permasalahan menjadi masalah yang pertahunnya belum terselesaikan, secara menyeluruh permasalahan permukiman kumuh tersebut terjadi karena beberapa factor dimana masih banyak kemiskinan, pengangguran, serta urbanisasi disetiap perkotaan, hal inilah yang menjadi factor penting yang terlebih harus diselesaikan karena mengacu pada terjadinya permukiman kumuh Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki dari segi ekonomi, social dan politik, banyak kekurangan serta kelebihan Indonesia, kekurangan itu sendiri menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Pasal 28H Ayat 1 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945), menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.(UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, 1945)

Dalam tantangan penataan pembangunann di Indonesia dimana permasalahan itu terkait dengan pertumbuhan penduduk secara alami yang meningkatkan kepadatan pemukiman serta perubahan kebutuhan rumah tangga perkotaan dan Reklasifikasi desa ke kota dimana meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar serta system pengelolaan perkotaan lalu ada kesenjangan antar wilayah dimana ketidakseimbangan pembangunann perdesaan dan perkotaan (*urbanrular linkages*) berdampak pada kesenjangan antar desa dan kota, lalu ada permasalahan kemiskinan setiap tahunnya kemiskinan menjadi masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan hal ini menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan kurang optimalnya kualitas sumber daya. (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Kemiskinan pun terjadi karena adanya ledakan populasi penduduk dan

berkurangnya lahan tempat tinggal sehingga berdampak pada munculnya permukiman kumuh karena adanya bangunan yang tidak layak huni dilahan yang tidak layak pula. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang tidak hanya muncul diindonesia melainkan di negeri lainnya, kemiskinan dapat membatasi seseorang dalam melakukan dan mendapatkan berbagai hal.

Namun seiring berjalannya waktu kemiskinan bukanlah menjadi satu-satunya problematika, ledakan populasi penduduk yang semakin tidak bisa terbendung maka jumlah penduduk selalu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan setiap tahunnya, dengan adanya populasi penduduk yang meningkat dampak yang timbul dengan berkurangnya lahan layak untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga dapat menyebabkan permasalahan baru seperti berganti fungsi lahan terbuka hijau dan fungsi lahan kosong lainnya.

Menjadi kawasan perumahan dan permukiman elit hingga munculnya permukiman kumuh yang mengganggu keindahan kota. Oleh karena itu penting untuk menyeimbangkan fungsi lahan dan bangunan untuk permukiman lahan yang terbuka hijau sehingga dapat mewujudkan kota sebagai kota hijau (*green cities*) yang menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan. Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasasl 28H ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup untuk layak sejahterah lahir dan batin bertempat dan mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat diatas menjelaskan bahwa rumah tatau tempat tinggal meruapakan hak dasar dan pemenuhannya harus dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Kemiskinan sangat memiliki dampak pada munculnya permukiman kumuh dengan rendahnya perekonomian penduduk akan menjadi factor yang tidak terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni, dikarenakan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan penghasilan yang tidak cukup untuk memiliki tanah atau rumah sehingga tidak sedikit dari mereka yang mendirikan bangunan di tempat yang tidak layak, selain itu hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan realita ada berdampak pada munculnya masalah kehidupan masyarakat yaitu munculnya kesan kota yang menjadi kumuh dan anggapan bahwa pemerintah kota tidak mampu menegelola

dan melakukan pembangunan permukiman yang berkualitas. (Kuswartojo T, n.d.)

Walaupun dengan berkurangan presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia hal ini tetap menimbulkan beberapa dampak dari kemiskinan seperti munculnya permukiman kumuh, karena adanya bangunan tidak layak huni di lahan yang tidak layak pula. **Kawasan Kumuh** di Indonesia. Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dengan masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia pemukiman kumuh akan terus terjadi di beberapa wilayah. Permasalahan kemiskinan setiap tahunnya menurun tetapi tidak dengan tatanan kota yang tidak semakin membaik, cenderung tetap kumuh. (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015)

Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Malang mencapai 40,62 ribu jiwa (4,62 persen), bertambah sebesar 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 38,77 ribu jiwa (4,44 persen). Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 adalah sekitar 4,62 persen, naik 0,18 persen poin terhadap Maret 2020 yang berada pada angka 4,44 persen. Pada Tahun 2021, Garis Kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 570.238,- per kapita per bulan atau meningkat sekitar 15,4 ribu rupiah dibanding Garis Kemiskinan pada Tahun 2020. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin. Kenaikan persentase penduduk miskin juga mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Malang pada Tahun 2021 sebesar 0,87 naik sebesar 0,21 poin jika dibandingkan pada Tahun 2020 yang berada pada angka 0,66. Sementara ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Malang tercatat sedikit melebar yang diindikasikan oleh adanya kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Tahun 2021 angka P2 Kota Malang sebesar 0,22 atau mengalami kenaikan 0,07 poin dibanding keadaan Tahun 2020 yang berada pada angka 0,15.

Kondisi pemukiman kumuh dapat timbul karena kondisi bangunan, kepadatan bangunan, kurangnya layanan air bersih dan kondisi jalanan lingkungan yang buruk. Jika kembali pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia telah melakukan beberapa program dalam menangani pemukiman kumuh maka dari itu juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Inovasi telah dikeluarkan oleh Indonesia sejak tahun 1999 hingga saat ini merupakan penanganan serius dalam permasalahan kawasan kumuh di Indonesia. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang hampir ada diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan hasil pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya kondisi tersebut akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk yang inovatif dalam penanganan secara menyeluruh dan tepat sasaran. (Badan Pusat Statistika Kota Malang.

Pemukiman kumuh masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten/kota selain merupakan masalah disisi lain ternyata menjadi salah satu factor penyangga perekonomian kota, mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian sangat kompleks diperlukan beberapa kolaborasi dari beberapa pihak pemerintah dan tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak lainnya. Keterlibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan dapat memberikan dampak positif antara lain untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penyacapaian kota layak huni, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memanfaatkan dhasil pembangunan. Oleh karena itu sebagai salah satu mewujudkan salah satu sasaran RPJM 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh ditahun 2019 Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), program kotaku mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam penanganan pemukiman kumuh untuk mewujudkan pemukiman layak huni melalau peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Penelitian tentang program Kotaku menunjukkan bahwa program Kotaku sudah dilaksanakan di Yogyakarta, Surakarta dan Kendari dengan hasil yang bervariasi, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada implementasi program Kotaku dalam upaya menanggulangi kawasan kumuh dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program Kotaku. (Saketi, 2020)

Program KOTAKU Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi yang menjadi platform kolaborasi penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini bermaksud untuk membangun system yang terpadu dalam penanganan permukiman kumuh. Kotaku diharapkan menjadi program yang mendukung permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap diseluruh Indonesia. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dalam hal ini tujuan program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh diperkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni produktif dan berkelanjutan. Tujuan umum dari Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastuktur dan pelayanan dasar pada kawasan kumuh dan untuk mendukung terwujudnya pemukiman yang layak huni produktif dan berkelanjutan (Khodijah Ishak, SH.I, 2019).

Landasan program tersebut ialah peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman. Tahapan pelaksanaan Program KOTAKU adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masingmasing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen

perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota (Kementerian PUPR, 2015). Salah satu program yang telah dikeluarkan di Indonesia dan saat ini telah berjalan di beberapa kota salah satunya Kota Malang Jawa timur program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hidup masyarakat melalui realisasi bangunan yang dapat meningkatkan akses fasilitas terhadap air bersih dsb. Akses ini berkaitan dengan kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, contoh nyata seperti yang ada di Kota Malang dengan mudahnya kita dapat menjumpai banyanyak permukiman yang tidak sehat, ketinggian bangunan yang tidak merata serta banyaknya rumah dialiran sungai dan juga dipinggir rel kereta api yang dapat membahayakan keselamatan.

Berdasarkan surat keputusan Walikota Malang No.188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh luas kawasan kumuh kota Malang adalah 608.6 Ha dan luas Wilayah Kota Malang adalah 11,606 Ha. Diputuskan juga terdapat 20 kelurahan yang masuk dalam kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh di Kota Malang dikelompokkan menjadi 3 yaitu bagian Timur Laut (Kelurahan Balai Arjosari, Blimbing, Purwantoro, Jodipan, Polehan, Pandangwangi) Bagian Barat (Kelurahan Cipto Mulyo, Bandungrejosari, Sukun, Tanjungrejo, Bandulan) Bagian Tengah (Kelurahan Bareng, Gadingkasri, Kiduldalem, Penanggungan, Samaan, Sukoharjo, Kasin, Kauman, Oro-oro dowo). Kampung Glintung kultur merupakan salah satu kampung wisata tematik yang ada di kota Malang yang terletak di kecamatan blimbing kelurahan purwantoro. Berdasarkan hasil riset terdahulu, program KOTAKU yang terdapat di lokasi yang lain yaitu di RT 09 RW 10 di Kelurahan Kota Lama Kota Malang masih jauh seperti yang diharapkan dikarenakan kurang ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya pada saat dilakukan pembangunan infrastruktur sehingga keberlanjutan program masih dipertanyakan (Cahyani, 2019). Penelitian lain dilakukan oleh Alfiani yang menyatakan bahwa keberhasilan program KOTAKU di lingkungan

Tanjungrejo, Kecamatan Sukun tidak lepas dari peran BKM (Badan Kesawadayaan Masyarakat). Lembaga ini sebagai penguat dalam berjalannya program KOTAKU dan sebagai mediator dalam terjalinnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Alfiani, 2018).

Kampung Glintung menjadi kampung tangguh, tak hanya tangguh kesehatan, tapi juga tangguh pangan, tangguh kemandirian, dan tangguh bencana. Peresmian dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 27 Mei 2020, dengan program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kampung Glintung Program KOTAKU menjadi salah satunya dalam mendukung kawasan kampung Glintung. Koordinator Program Kotaku Kota Malang, Arif Prasetyo, mengatakan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru, yang juga menjadi target RPJMN 2020 – 2024.

Dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diharapkan pemerintah serta masyarakat Kampung Glintung dapat bekerja sama dalam melaksanakan program ini untuk merentas permukiman kumuh yang ada di wilayah tersebut, diharapkan pula hal ini menjadi prioritas masyarakat kampung Glintung dalam julukan yang telah diresmikan dengan nama Kampung Glintung Tangguh, yang dimana juga tidak hanya focus dalam kesehatan tapi juga kebersihan lingkungan serta kesejahteraan dalam hunian tempat tinggal masyarakat.

Kampung Glintung yang terletak di Kota Malang Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwantoro adalah kampung tangguh yang telah melaksanakan beberapa program seperti Program Glintung Water Street (GWS) dimana kampung disulap menjadi urban farming yang sustainable atau berkesinambungan, melihat antusiasme kepedulian warga untuk ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan ini, peneliti tertarik apakah jika Program KOTAKU menjadi program yang juga bisa sukses dan dipedulikan oleh masyarakat seperti program GWS sebelumnya. Karena jika dilihat pembangunan permukiman tempat tinggal masyarakat juga harus dipedulikan lebih lanjut, karena tempat tinggal sebagian warga harus juga pada lahan yang layak huni

sehingga terhindar dari permukiman yang kumuh. Dengan adanya program KOTAKU diharapkan Kampung Glintung menjadi kampung yang tangguh dan siggap dalam penanganan pembangunan Permukiman Tanpa Kumuh.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan arahan yang tepat terkait **”Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang”**. Dalam perumusan arahan tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melihat kondisi Kampung Glintung Kota Malang yang semakin lama semakin meningkat permukiman kumuhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang diatas maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang ?
2. Bagaimana permasalahan yang muncul dalam Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas maka tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang
2. Untuk Mengetahui Apa permasalahan yang muncul dalam Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kmapung Glintung Kecamatan  
Blimbing Kota Malang

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, praktis, maupun akademis. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut :

**1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis nantinya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang jalannya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dijalankan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengatasi kualitas permukiman yang berakibat tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

**2. Manfaat Praktis**

- a. Dalam penelitian berkaitan dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dimana dapat memberikan referensi penelitian ini
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang
- c. Sebagai bahan masukan bagi tiap sektor atau *stakeholder* yang terlibat dalam mengatasi kualitas permukiman yang berakibat tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan terkhusus Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang

**3. Manfaat Akademik**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca

tentang studi kebijakan, khususnya terkait dengan Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang.

- b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang dikaitkan dengan studi Peran Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi kualitas permukiman yang berakibat tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan.

## **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa hasil penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan judul dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi konsep adalah :

### **a. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melalui aktivitas implementasi diketahui upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait mengoptimalkan capaian tujuan kebijakan (Akib, 2010) Dengan pemahaman seperti itu, maka implementasi Program Kotaku sebenarnya berkaitan erat dengan upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan capaian tujuan Program Kotaku. Dalam sebuah implementasi program tentu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah pelaksanaan. Edward III dalam Indiohono (2009) mengatakan bahwa ada empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian Woll (Tangkilisan, 2003:02) mengungkapkan terkait pengertian kebijakan yang merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa “Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.” (Wahab dalam Webster, 2008).

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan Program Nasional melalui kebijakan dari pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertujuan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah provinsi atau kab/kota harus melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa permukiman kumuh di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Inovasi sangat diperlukan terkait penyelesaian masalah ini, maka hadirilah Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dapat menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh setiap pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### **b. Pembangunan Berbasis Komunitas**

Secara umum Pembangunan Berbasis Komunitas dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang

diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dengan tujuan mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Menurut PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut :

"Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri".

**c. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara nasional yang mana fokus pada permasalahan tersebut yakni terkait penyelesaian permasalahan kumuh perkotaan. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh sebagai berikut :

"Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0- 100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 hektar permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak".

Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Program yang dilaksanakan secara nasional di 269 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang ada mengerahkan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan termasuk dari

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pihak Donor, Swasta, Masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, program tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan kumuh yang ada berdasarkan SK di setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Adapun karakteristik perumahan dan permukiman kumuh dari segi fisik yakni sebagai berikut :

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidangkeciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana yang ada yaitu :
  - a. Keteraturan bangunan
  - b. Drainase lingkungan
  - c. Penyediaan air bersih/minum
  - d. Pengelolaan persampahan
  - e. Pengelolaan air limbah
  - f. Pengamanan kebakaran
  - g. Ruang terbuka publik

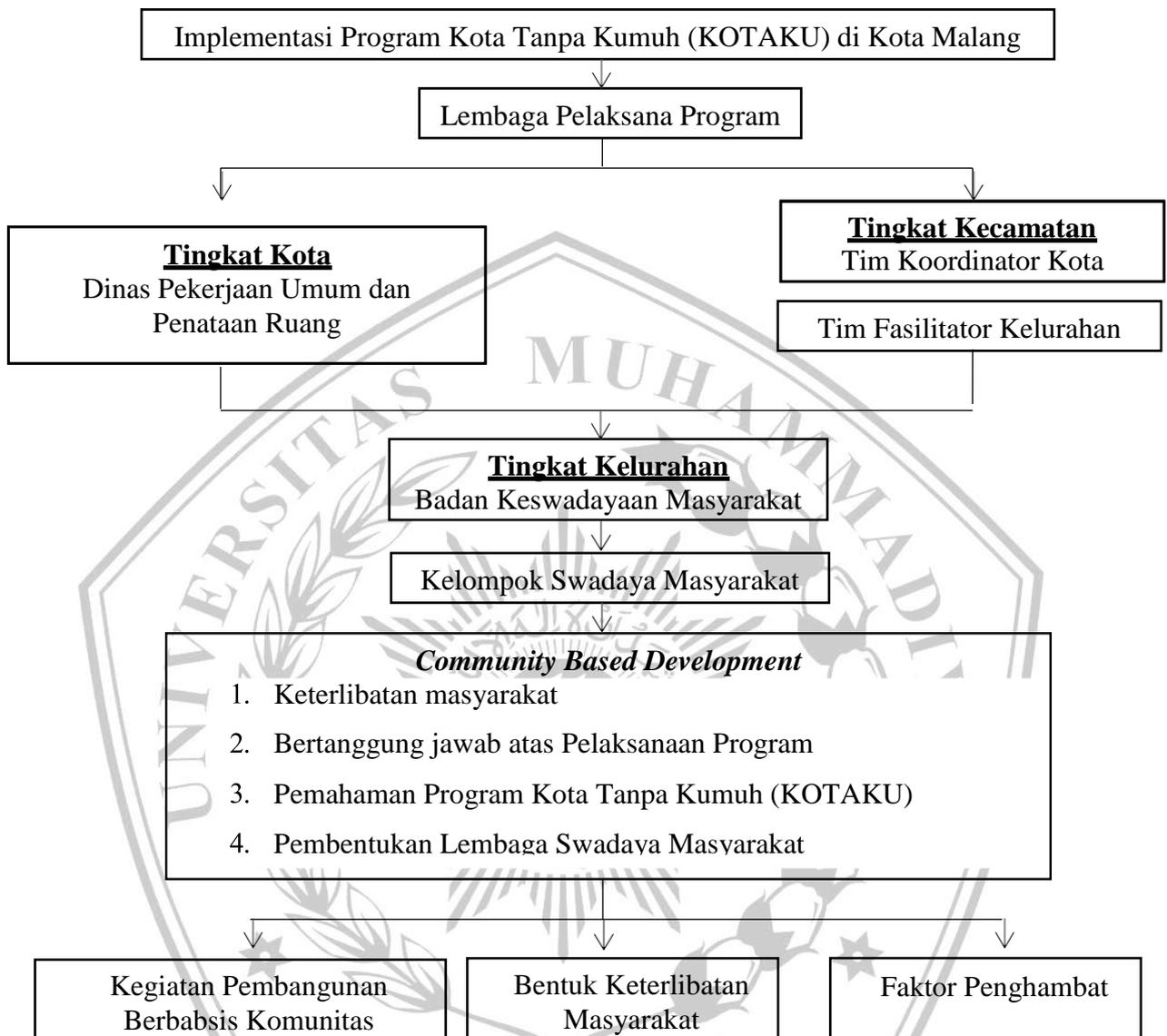
Karakteristik fisik yang ada selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari permasalahan permukiman kumuh dalam proses identifikasi lokasi. Kemudian, mengacu pada karakter utama *Community Based Development* (CBD) karakter fisik yang ada dapat dilaksanakan berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat, dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik juga perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha dan sebagainya.

## F. Definisi Operasional

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.

1. Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang
  - b. Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang
  - c. Pemahaman Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
  - d. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat
2. Pemasalahan yang muncul dalam Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## G. Kerangka Berfikir



## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang di tempat penelitian. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur pada pelaksanaan Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dengan harapan hasil penelitian yang nantinya akan dilakukan mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan dan tidak hanya sekedar sajian data.

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang di tempat penelitian. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dengan harapan hasil penelitian yang nantinya akan dilakukan mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan dan tidak hanya sekedar sajian data.

## **2. Sumber Data**

Data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, sumber data yang ditemui yakni pada wawancara dilapangan pada instansi pemerintahan setempat.

### **a) Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam wawancara ini akan melibatkan beberapa narasumber terkait judul penelitian seperti yang telah ditetapkan

dalam subyek penelitian untuk mendapatkan data yang dimaksud, wawancara yang dilakukan mengenai wawancara tentunya tidak melibatkan semua melainkan menggunakan sampling responden yang telah diteliti

## **b) Data Sekunder**

Data sekunder digunakan untuk mendapatkan landasan teori penelitian dan memperkuat data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh melalui data dokumentasi

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Pada saat penelitian sebelum dilakukan wawancara peneliti akan terlebih dahulu melakukan observasi. Dengan melakukan observasi secara langsung maka peneliti akan menemukan fenomena-fenomena dilapangan mengenai Pembangunan Berbasis Komunitas Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kampung Glintung Kecamatan Blimbing Kota Malang

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut atau mengetahui fakta dari sebuah fenomena yang diamati, maka peneliti akan melakukan hal tersebut kepada subjek penelitian, agar data yang diperoleh bersifat objektif. Hal ini

juga bertujuan untuk menemukan hubungan antara beberapa fenomena yang terjadi sehingga nantinya akan didapat kesimpulan dalam penelitian ini. Selain itu, untuk memperoleh penjelasan atas pertanyaan atau kurangnya pemahaman peneliti terhadap suatu hal.

**c. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat data yang diperoleh dari informan lapangan guna mendukung proses penelitian. Dokumentasi didapat dari instansi terkait bisa berupa foto, dokumen, peraturan, arsip dll. Selanjutnya bisa dari jurnal, catatan lapang peneliti, notulensi rapat yang nantinya dapat memperkuat data.

